

Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Black Sea Grain Initiative* (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023

Frequency of International Relations
September, Vol 7 (2) 156 - 189
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track:
Submitted: December 04, 2025
Accepted: May 04, 2026
Available On-line: June 27, 2026

Muhammad Iqbal Devanto

Hubungan Internasional, Universitas Airlangga
Iqbaldevanto01@gmail.com

Amelia Fatimatuzzahra

Hubungan Internasional, Universitas Airlangga
Ameliafzahra03@gmail.com

Zamharirah Sang Putri

Hubungan Internasional, Universitas Airlangga
Zamharirahsp02@gmail.com

Abstract

Berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina menyebabkan hambatan pada pasokan komoditas pangan global. Situasi ini mendorong berbagai upaya diplomatik dari negara-negara dan organisasi internasional kepada pihak yang berkonflik, namun tidak ada yang berhasil. Di tengah kebuntuan diplomatik ini, PBB justru dapat mencapai terobosan kesepakatan di antara kedua pihak melalui *Black Sea Grain Initiative* (BSGI) pada tahun 2022. Akan tetapi, kesepakatan BSGI hanya bertahan sampai tahun 2023 dengan penangguhan sepihak dari Rusia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menerapkan teori Abbott dan Snidal, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana atribut independensi PBB memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan pelaksanaan *Black Sea Grain Initiative* (BSGI) antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022–2023. Penelitian menemukan bahwa atribut independensi PBB pada kesepakatan BSGI lebih mudah diterima karena mampu mengalihkan fokus dari isu politik-militer yang sensitif ke isu kemanusiaan dan ketahanan pangan global. Skema ini berhasil

menyeimbangkan kepentingan Ukraina untuk membuka blokade pelabuhan dengan kepentingan Rusia terkait akses ekspor pertanian dan pupuk. Namun, keterbatasan struktural seperti tarik-menarik kepentingan negara dan ketiadaan mandat supra-nasional absolut untuk mengintervensi kebijakan domestik yang menghambat ekspor Rusia membuat janji fasilitasi pasar bagi Rusia tidak mudah dieksekusi, yang pada akhirnya menggerus persepsi netralitas PBB dan memicu krisis kepercayaan.

Keywords: Independensi; PBB; Black Sea Grain Initiative; Rusia; Ukraina

Pendahuluan

Berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina menyebabkan hambatan pada pasokan komoditas pangan global. Blokade rute pelayaran Laut Hitam Ukraina dan sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia menjadi faktor utama yang mengganggu rantai pasok pangan global (McGuirk dan Burke 2022). Akibatnya, ekspor biji-bijian penting dunia seperti gandum dan jagung menjadi terhenti (Sudirman 2025). Hal ini berdampak pada dua hal utama, pertama yaitu lonjakan harga biji-bijian. Rusia dan Ukraina merupakan pemasok 30% gandum global (McGuirk dan Burke 2022). Selain gandum, Ukraina juga menjadi pemasok 14% jagung dan 75% minyak bunga matahari global (McGuirk dan Burke 2022).

Trading Economics melaporkan bahwa tidak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina, harga gandum meningkat lebih dari 38% dengan harga 11,73 USD per gantang dan jagung meningkat hampir 15% dengan harga 7,56 USD per gantang pada Februari 2022 (Trading Economics 2025). Pada Mei 2022, 1 harga gandum bahkan melampaui \$500 per ton di mana ini menunjukkan peningkatan sebesar 40% dan harga jagung telah naik sebesar 25% (Bondarenko 2025). Hal ini menggambarkan bahwa guncangan struktural terhadap produksi di

negara-negara pengekspor utama global seperti Rusia dan Ukraina dapat memberikan efek pada tren harga global yang tidak proporsional.

Dampak kedua, konflik Rusia-Ukraina juga mengancam ketahanan pangan global di mana Devadoss dan Ridley menyoroti bahwa gandum menyumbang sekitar 20% dari asupan kalori global (Devadoss dan Ridley 2024). Dengan adanya pemblokiran rute Laut Hitam dan sanksi ekonomi pada Rusia, negara-negara di dunia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Ancaman terhadap ketahanan pangan global ini lebih dirasakan oleh negara-negara *Global South* khususnya wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah di mana mereka sangat bergantung pada Ukraina sebagai 92% eksporter gandum mereka di tahun 2016-2021 (Bondarenko 2025).

Situasi ini mendorong berbagai upaya diplomatik dari negara-negara dan organisasi internasional kepada pihak yang berkonflik. AS memimpin maraton upaya diplomatik selama berminggu-minggu, namun sama sekali tidak menghasilkan terobosan. Beberapa *shuttle diplomacy* untuk memediasi konflik di antara keduanya sudah dilakukan, misalnya seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang melakukan panggilan telepon berjam-jam dengan Putin untuk mendesak gencatan senjata di awal perang serta keduanya juga mengunjungi Moskow dan Kyiv (Roth dan

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

Borger 2022; Tyshchenko dan Kutielieva 2025). Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan juga melakukan hal serupa dengan memfasilitasi pertemuan tatap muka antara Rusia dan Ukraina di Antalya, tetapi kesepakatan gagal dicapai akibat penemuan bukti serangan Rusia ke rumah sakit anak-anak di Mariupol (Rankin dkk. 2022). Dari berbagai tindakan diplomatik tersebut, tidak ada kesepakatan formal yang tercapai.

Organisasi internasional seperti *International Maritime Organization* (IMO) menawarkan pembentukan *Blue Corridor Initiative* sebagai solusi teknis untuk mengamankan kapal-kapal komersial keluar dari pelabuhan Ukraina. Inisiatif tersebut merupakan upaya darurat untuk menyelamatkan orang dan aset sipil yang terjebak di garis depan pertempuran laut. Namun, inisiatif tersebut gagal terlaksana terutama karena Ukraina tidak menyetujui rencana tersebut, meskipun Rusia awalnya memberikan respons positif. Ukraina mempertanyakan apakah Rusia benar-benar akan memberikan lintasan yang aman bagi kapal-kapal yang terdampar tersebut setelah mereka tidak lagi berada di bawah kendali Ukraina mengingat Rusia pernah menyerang kapal dagang netral di Laut Hitam yang menjadi titik awal permusuhan di antara keduanya. Ukraina memiliki skeptisisme yang sangat kuat bahwa Rusia akan mematuhi

jaminan keamanan di koridor tersebut sehingga inisiatif ini pada akhirnya tidak dapat tercapai (Pedrozo 2023).

Di tengah kebuntuan diplomatik ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah diplomatik langsung dengan mengunjungi Moskow dan Kyiv untuk mengajukan rencana memfasilitasi akses penuh ke pasar dunia bagi pupuk dan pangan Rusia dan Ukraina pada April 2022. Kunjungan tersebut justru berhasil memfasilitasi kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* (BSGI) dengan Rusia dan Ukraina pada Juli 2022 (Ay dan Söylemez 2023).

Penulis berargumen bahwa kesepakatan BSGI pada tahun 2022 berhasil dicapai karena atribut independensi PBB memungkinkan organisasi tersebut berfungsi secara efektif dan efisien. Namun, keputusan Rusia keluar dari kesepakatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa atribut independensi PBB memiliki batasan otonomi dan netralitas, sehingga hanya mampu memfasilitasi pencapaian kesepakatan tetapi gagal mempertahankannya dalam jangka panjang. Kontradiksi antara keberhasilan awal dan kegagalan struktural ini menuntut eksplanasi lebih mendalam mengenai mengapa PBB berhasil memfasilitasi pencapaian BSGI pada 2022, tetapi tidak berhasil mempertahankan kesepakatan tersebut pada 2023.

Meskipun berbagai aktor seperti Amerika Serikat, Turki, Prancis, Jerman, dan IMO telah melakukan upaya diplomatik, sebagian besar gagal menghasilkan kesepakatan konkret. Sebaliknya, PBB berhasil memfasilitasi terbentuknya BSGI namun keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama karena Rusia mengeluarkan diri. Kasus ini menunjukkan adanya paradoks di mana atribut independensi PBB tampak efektif dalam memfasilitasi pembentukan kesepakatan, tetapi tidak cukup kuat untuk mempertahankan keberlangsungan kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana atribut independensi PBB memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan kesepakatan BSGI antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022–2023.

Banyak literatur terdahulu yang mengkaji mengenai isu BSGI. Namun, mayoritas berfokus untuk membahas pada aspek peran BSGI maupun peran atau strategi suatu negara dalam/melalui BSGI. Pada topik peran BSGI, mayoritas membahas mengenai BSGI yang berperan dalam mengganggu pasar pangan dan efektivitasnya yang menghadapi tantangan geopolitik di mana keberlanjutan BSGI bergantung pada logistik dengan rute tunggal yang rapuh karena dinamika politik yang terjadi pada kala itu (Sudirman 2025). Literatur lain membahas mengenai peran Turki dalam mendorong kemajuan pencapaian BSGI dan juga menyoroti sisi lain dari BSGI yang menjadi kemenangan

diplomatik Rusia yang terukur (Pedrozo 2023; Ay dan Söylemez 2023). Melihat hal ini, belum ditemukan literatur yang membahas mengenai tindakan PBB dalam BSGI, terutama yang berfokus pada mengenai atribut independensi yang dimilikinya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur pada topik tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif untuk menjelaskan mengapa fenomena pencapaian dan pemberhentian kesepakatan BSGI terjadi. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, dinamika diplomasi, serta konstruksi makna yang melandasi tindakan aktor internasional, yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif yang bersifat pengukuran. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Abdussamad 2021). Metode kualitatif-eksplanatif merupakan model yang digunakan untuk mendalami suatu proses di balik terjadinya suatu fenomena (George dan Merkus 2025). Data dalam penelitian ini dihimpun melalui studi kepustakaan dengan data primer yang menelaah berbagai sumber yang relevan dan kredibel seperti dokumen resmi PBB serta data sekunder seperti artikel jurnal, buku, situs web

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

berita, dan lain-lain yang membahas mengenai PBB, Rusia, Ukraina, dan BSGI.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Abbott dan Snidal mengenai atribut dan fungsi organisasi antar-pemerintah internasional (IGO) yang berakar pada pendekatan rasional dan institusional (Abbott dan Snidal 1998). Pendekatan ini memandang bahwa negara, meskipun merupakan aktor rasional yang egois, tetap membutuhkan institusi untuk mencapai keuntungan bersama yang optimal. Menurutnya, salah satu atribut utama yang dimiliki oleh organisasi internasional formal adalah independensi. Atribut ini memberikan organisasi internasional formal otoritas untuk bertindak dengan tingkat otonomi dan netralitas tertentu. Abbott dan Snidal mengklasifikasi penggunaan atribut ini menjadi dua yaitu mendukung interaksi langsung negara-negara dan mengelola operasi substantif.

Pertama, dalam mendukung interaksi antar negara, atribut ini dapat memengaruhi agenda negosiasi, mengembangkan dan menyebarkan berbagai ide baru untuk tata kelola global karena anggota organisasi internasional formal terdiri dari komunitas epistemik, dan mengawasi kepatuhan negara-negara dalam mengimplementasikan kesepakatan. Fungsi pengaturan agenda sangat krusial karena organisasi internasional formal memiliki kewenangan untuk

menentukan isu mana yang layak dibahas dan bagaimana isu tersebut dibingkai. Organisasi internasional formal memiliki sekretariat dan staf ahli, mereka juga dapat memasukkan isu-isu tertentu ke dalam diskursus global yang mungkin diabaikan oleh negara karena kepentingan politik jangka pendek.

Kedua, dalam mengelola operasi substantif, atribut ini memfasilitasi organisasi internasional formal untuk bertindak sebagai *launderer* dan pihak netral. Sebagai *launderer*, independensi organisasi internasional formal memungkinkannya untuk mengubah tindakan negara yang sensitif secara politik menjadi lebih dapat diterima. Konsep *laundering* ini memungkinkan negara-negara anggota untuk melakukan tindakan yang mungkin sulit diterima oleh konstituen domestik atau komunitas internasional jika dilakukan secara unilateral. Dengan menyalurkan bantuan, intervensi, atau kebijakan melalui organisasi internasional formal, negara dapat bersembunyi di balik objektivitas organisasi internasional formal tersebut. Hal ini memberikan legitimasi pada tindakan yang sebenarnya bermuatan politis, sehingga mengurangi resistensi politik.

Sedangkan, sebagai pihak netral, atribut tersebut juga memberikan organisasi internasional formal otoritas untuk menyediakan informasi yang tidak bias, dipercaya untuk memegang

aset sengketa, mengalokasikan sumber daya, menyelesaikan sengketa baik sebagai mediator ataupun arbiter. Netralitas ini sangat vital untuk memecahkan dilema keamanan atau masalah ketidakpercayaan yang ada di antara negara-negara. Dalam situasi di mana informasi asimetris sering kali menghambat kerja sama, organisasi internasional formal bertindak sebagai pihak ketiga yang memverifikasi data, memastikan bahwa tidak ada pihak yang mencurangi kesepakatan, dan menciptakan iklim transparansi yang stabil.

Abbott dan Snidal juga menyoroti dua fungsi utama organisasi internasional formal yaitu sebagai dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan komunitas dan sebagai penegak aturan. Pertama, sebagai perwakilan komunitas organisasi internasional formal bertindak sebagai perwujudan dari komunitas negara. Organisasi internasional formal menjadi sarana bagi negara-negara dalam mengekspresikan kepentingan dan nilai-nilai bersama mereka. Dalam konteks ini, organisasi internasional formal menjadi instrumen teknis sekaligus sosiologis yang menjadi wadah dalam pembentukan identitas kolektif. Melalui partisipasi rutin dalam forum organisasi internasional, negara-negara mengalami proses sosialisasi yang secara perlahan menyelaraskan pandangan dunia mereka. Organisasi internasional formal berfungsi untuk mengembangkan norma dan aspirasi di mana ketika hal tersebut dimasukkan dalam perjanjian yang mengikat yang

pada akhirnya menjadi hukum nasional, hal tersebut mempengaruhi karakter, preferensi, dan perilaku negara yang kemudian juga memengaruhi sistem internasional. Proses difusi norma ini menjadi kekuatan organisasi internasional formal untuk memupuk logika kepatutan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas yang baik.

Masalah yang membutuhkan tanggapan operasional juga akan lebih efisien untuk ditangani dalam forum yang disediakan oleh organisasi internasional formal. Kedua, organisasi internasional formal berfungsi sebagai penegak aturan yang memastikan kepatuhan negara. Fungsi penegakan ini sering kali tidak bersifat koersif seperti sanksi militer tetapi biasanya bersifat manajerial. Organisasi internasional formal berperan penting dalam manajerial proses penegakan hukum yang tidak terlalu mengganggu masyarakat global yang lebih besar. Terdapat tiga alasan yang menyebabkan negara menjadi tidak patuh pada aturan yang disepakati yaitu klausul dalam perjanjian memiliki makna yang ambigu, negara memiliki kapasitas yang tidak mencukupi dalam memenuhi tujuan yang diharapkan, dan kondisi atau situasi nasional atau internasional yang berubah.

Abbott dan Snidal berpendapat bahwa ketidakpatuhan jarang disebabkan oleh niat buruk yang disengaja. Oleh karena itu, respons

organisasi internasional formal terhadap ambiguitas adalah dengan memberikan interpretasi otoritatif melalui badan peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Jika masalahnya adalah kapasitas, organisasi internasional formal menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan sumber daya finansial untuk membantu negara-negara dalam mematuhi standar global. Terakhir, untuk mengatasi perubahan kondisi, organisasi internasional formal menyediakan mekanisme peninjauan kembali yang memungkinkan adaptasi aturan tanpa harus meruntuhkan seluruh perjanjian.

Dalam memfasilitasi kesepakatan, atribut independensi memainkan peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar menyediakan tempat pertemuan. Kemampuan organisasi internasional formal untuk bertindak secara independen memungkinkan terciptanya efisiensi dalam proses tawar-menawar antarnegara. Negara sering kali terjebak dalam kecurigaan bahwa usulan perjanjian dari negara lain pasti mengandung agenda tersembunyi yang merugikan. Independensi organisasi internasional formal bertujuan untuk memutus siklus ketidakpercayaan tersebut. Karena staf organisasi internasional dipandang bertindak berdasarkan mandat birokrasi dan bukan kepentingan nasionalistik, draf perjanjian yang mereka susun memiliki legitimasi netralitas. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk menyetujui poin-poin kesepakatan yang mungkin akan mereka tolak

mentah-mentah jika poin yang sama diajukan oleh negara rival. Dengan kata lain, independensi organisasi internasional formal menurunkan biaya transaksi politik dan menyediakan titik temu yang mempermudah konvergensi kepentingan negara.

Namun, Abbott dan Snidal menekankan bahwa mempertahankan tingkat independensi yang ideal ini merupakan tantangan yang sangat sulit dan penuh dilema. Organisasi internasional menjadi agen atau pemberi mandat dan negara menjadi prinsipalmatau penerima mandat. Ketika organisasi internasional formal menggunakan independensinya terlalu jauh, misalnya dengan membuat aturan yang dianggap melanggar kedaulatan, negara anggota cenderung bereaksi keras untuk membatasi otonomi tersebut. Fenomena ini sering disebut sebagai upaya untuk mencegah agen bertindak di luar keinginan prinsipalnya.

Black Sea Grain Initiative (BSGI)

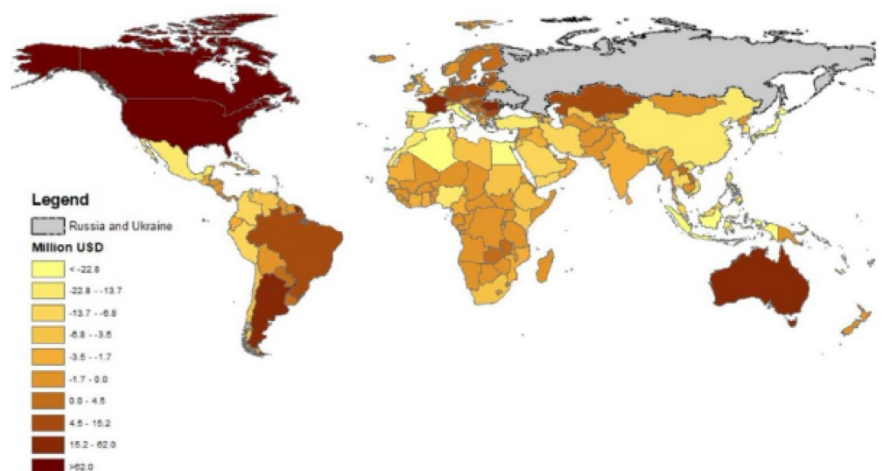
Black Sea Grain Initiative (BSGI) merupakan kesepakatan yang terbentuk antara PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina yang disetujui pada 27 Juli 2022 setelah melewati negosiasi selama 3 bulan. BSGI dibentuk dengan tujuan untuk mencegah krisis pangan global di tengah konfliknya dengan Rusia. Dalam BSGI, terdapat dua kesepakatan yang ditandatangani. Pertama, PBB membuat kesepakatan dengan Rusia

mengenai pengurangan sanksi ekonomi atau perdagangan terhadap produk pangan dan pupuk termasuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksinya agar dapat diekspor tanpa hambatan ke pasar global dengan difasilitasi oleh *United Nations Trade and Development* (UNCTAD). Kedua, kesepakatan antara PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina mengenai ekspor bahan pangan, pupuk, biji-bijian dan amonia dari tiga pelabuhan Ukraina yaitu Odessa, Chernomorsk, dan Yuzhny di Laut Hitam dapat ditransportasikan secara aman di tengah peperangan dengan difasilitasi oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA). Sejak penandatanganan inisiatif ini, jangka waktu berlakunya adalah 120 hari. Inisiatif ini dapat diperpanjang secara otomatis selama 120 hari berikutnya kecuali jika salah satu pihak memberi tahu mengenai niat pengakhiran atau perubahan inisiatif tersebut (Pedrozo 2023; United Nations 2022).

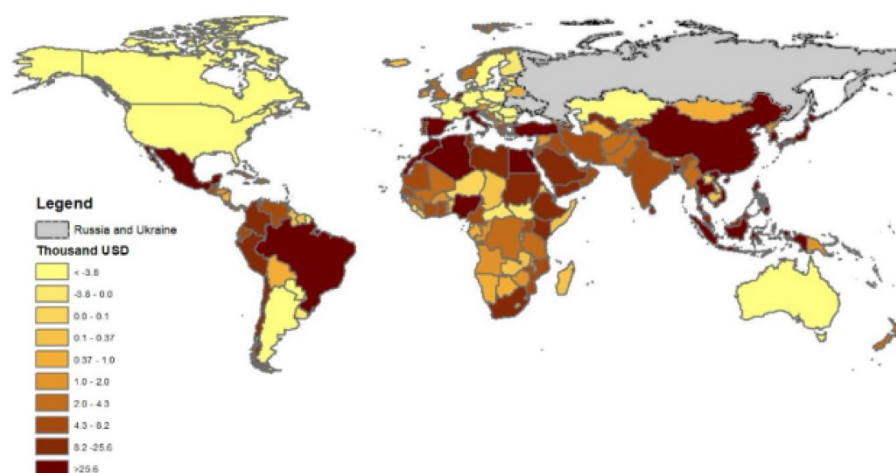
Di bawah kesepakatan kedua, PBB membentuk *Joint Coordination Centre* (JCC) yang terdiri dari perwakilan PBB dan masing-masing negara yang menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi implementasinya, mulai dari mengoordinasikan pergerakan kapal dagang hingga melaporkan kepatuhan prosedur dari inisiatif. Secara lebih spesifik, JCC yang berpusat di Istanbul dan memiliki tim inspeksi gabungan yang bertugas memeriksa setiap kapal

guna memastikan tidak ada penyelundupan senjata atau kargo militer terlarang. JCC telah memfasilitasi lebih dari 1.600 pelayaran kapal yang aman melalui Laut Hitam hingga Maret 2023. Adanya fasilitas ini membuat Ukraina berhasil mengekspor hampir 24,5 juta ton biji-bijian dan produk pangan. Dari 24,5 juta ton ekspor pangan tersebut, 55% ditujukan ke negara-negara berkembang. BSGI juga menurunkan harga gandum sebesar 7,9% di pasar global. Berdasarkan pada gambar 1, BSGI memberikan dampak positif yang signifikan pada negara-negara berkembang di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah (United Nations 2022a; Poursina dkk, 2024).

Figure 3: Regional Impacts of Russian Invasion and Black Sea Grain Initiative



(a) Regional Impacts of Russian Invasion



(b) Regional Impacts of Black Sea Grain Initiative

Notes: Figure assesses the regional distribution of the welfare impacts to global grain markets due to the Russian Invasion and Black Sea Grain Initiative. These impacts are derived by multiplying a given country's net exports of wheat and corn by the estimated Invasion- and treaty-generated price differentials shown in Table 1. The logic here is that—in any given country—the losses (gains) incurred by local producers on domestically produced grain associated with lower (higher) prices due to the Black Sea Grain Initiative (Russian Invasion) are offset by the savings generated by local consumers of the grain. However, the country incurs a net welfare gain (loss) due to the Black Sea Grain Initiative (Russian Invasion) on wheat it imports at the lower (higher) prices.

Gambar 1: dampak BSGI secara global (Poursina dkk., 2024)

Sementara BSGI telah menjadi kunci dalam mengurangi kenaikan harga gandum global yang didorong oleh konflik, kesepakatan

tersebut juga menghadapi hambatan. Inspeksi pengiriman oleh entitas PBB yang bertugas mengelola BSGI sangat lambat. Mereka sering kali membatasi jumlah pengiriman biji-bijian bulanan yang terjadi di bawah kesepakatan. Hal ini pada akhirnya menghambat efisiensi gandum dan biji-bijian lainnya yang dapat diekspor dari pelabuhan Ukraina. Selain itu, Rusia juga terus mengancam penarikan dirinya dari kesepakatan jika tuntutan untuk keringanan sanksi tidak segera terpenuhi. Pada akhirnya, Rusia mengumumkan penarikannya dari kesepakatan pada 17 Juli 2023 dengan alasan bahwa tuntutan yang disepakati tidak terpenuhi yaitu mengenai pencabutan sanksi keuangan terhadap bank-bank tertentu Rusia tertentu.

Kekuatan PBB dalam mencapai BSGI

1. Transformasi isu politik militer menjadi pangan kemanusiaan

Kesepakatan BSGI dapat dapat tercapai karena PBB mencuci konflik Rusia-Ukraina dari isu politik militer menjadi isu pangan kemanusiaan. Abbott dan Snidal mengemukakan bahwa tindakan yang dinilai sensitif bagi negara menjadi lebih dapat untuk diterima jika dilakukan oleh organisasi internasional formal karena atribut independensi yang dimilikinya. Pada awalnya, kasus konflik Rusia-Ukraina merupakan isu politik yang melibatkan penggunaan militer.

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

Rusia merasa terancam dengan kehadiran pasukan militer Ukraina di perbatasan dan keinginannya untuk bergabung dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Mayoritas negara-negara yang menawarkan untuk memediasi konflik tersebut meminta Rusia untuk menghentikan serangannya pada Rusia di mana hal ini merupakan isu yang sensitif baginya karena sangat berorientasi politik (BBC News Indonesia, 2022; Rankin dkk., 2022; Roth & Borger, 2022; Tyshchenko & Kutielieva, 2025). Jika Rusia menerima permintaan tersebut, maka Rusia akan terlihat seperti negara yang lemah.

Namun, dalam kasus ini, PBB mengemas tindakan yang bermuatan politis menjadi aktivitas netral agar memiliki legitimasi yang lebih luas dan dapat diterima. Sebelumnya, Turki juga sempat menawarkan untuk memediasi masalah ini, namun tidak berhasil mencapai terobosan (Ay & Söylemez, 2023). PBB membingkai kesepakatan BSGI sebagai “*beacon of hope*” untuk mencegah krisis pangan global, bukan sebagai konsesi militer kepada musuh seperti jika dilakukan oleh Turki, Prancis, Jerman, dan negara-negara lain secara unilateral (United Nations, 2022a). Pendekatan ini membuat Rusia untuk menyetujui pembukaan blokade tanpa terlihat lemah, bahkan memanfaatkannya untuk memoles citra dirinya sebagai aktor yang peduli pada kebutuhan negara berkembang. Persetujuan Ukraina juga dikarenakan pendekatan ini berbeda kontras dengan *Blue Corridor*

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

Initiative dari IMO sebelumnya yang gagal tercapai karena kentalnya ketidakpercayaan militer dan tuduhan politis Ukraina terhadap Rusia.

2. Netralitas operasional

Sekretaris Jenderal PBB secara langsung bertindak imparial untuk memediasi masalah ini dengan mengunjungi Rusia dan Ukraina secara langsung. Abbott dan Snidal menyebutkan bahwa organisasi internasional formal memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa sebagai mediator. Tindakan PBB ini dilihat sebagai wujud netralitasnya dalam mengelola penyelesaian konflik. PBB berusaha menawarkan sebuah solusi yang dapat memberikan keuntungan yang sama untuk dapat disetujui oleh kedua pihak. Berbeda dengan tawaran-tawaran kesepakatan pihak lain yang cenderung menguntungkan dan merugikan satu pihak. PBB tidak meminta Rusia untuk menghentikan operasi militer yang dilakukannya terhadap Ukraina, melainkan memastikan keamanan logistik pengiriman produk pangan melalui jalur Laut Hitam di 3 pelabuhan Ukraina dengan imbalan keringanan terhadap sanksi ekonomi global terhadap Rusia.

Tindakan PBB ini dilakukan untuk menyampaikan urgensi ancaman kelaparan global khususnya negara-negara berkembang karena gangguan logistik pada produk pangan. Dalam hal ini, tindakan tersebut menunjukkan bahwa PBB menjalankan fungsinya sebagai

perwakilan komunitas negara-negara untuk menyampaikan aspirasi, seperti yang diungkapkan oleh Abbott dan Snidal. Poursina dkk menemukan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia menimbulkan biaya ekonomi sekitar 116,05 miliar USD di pasar gandum dan jagung global. Dengan adanya BSGI ini, harga gandum menurun 7,9% yang menghabiskan sekitar \$21,48 miliar dari biaya tersebut (Poursina dkk., 2024).

Selain itu, tindakan PBB ini juga menunjukkan penegasannya mengenai prinsip dan tujuan yang ada dalam piagam PBB mengenai perdamaian dan keamanan global. Abbott dan Snidal juga menjelaskan bahwa organisasi internasional formal menjadi perwakilan komunitas negara-negara untuk menegakkan kembali negara yang tidak patuh terhadap norma-norma yang telah disepakati. Dalam sidangnya, tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina dianggap sebagai tindakan ‘agresi’ yang melanggar aturan-aturan dalam piagam PBB. Sebanyak 141 negara mendukung pernyataan tersebut, dari 193 negara. PBB memiliki organisasi yang mengemban ‘tanggung jawab’ untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan global, berfungsi untuk mencegah dan menghentikan perang (VOA, 2022).

Keberhasilan tercapainya kesepakatan ini didorong oleh posisi netral PBB yang mampu menjembatani ketidakpercayaan mendalam

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

antara Rusia dan Ukraina melalui mekanisme pengawasan yang objektif. Abbott dan Snidal menekankan bahwa sebagai pihak netral, organisasi internasional memiliki otoritas untuk memverifikasi informasi, memediasi sengketa, dan mengatasi dilema keamanan yang menghambat kerja sama antarnegara. Untuk menjawab kecurigaan Rusia akan penyelundupan senjata dan ketakutan Ukraina akan serangan mendadak, PBB membentuk JCC yang memantau pergerakan kapal secara jarak jauh dan melakukan inspeksi gabungan di pelabuhan Turki yang menunjukkan bahwa PBB tidak condong pada salah satu pihak saja, melainkan menggunakan pihak ketiga. PBB memastikan kapal dagang berada pada jalur yang aman dan melarang kapal militer atau pesawat tak berawak mendekati koridor kemanusiaan dalam radius tertentu. Mekanisme verifikasi netral ini terbukti berhasil memfasilitasi lebih dari 1.600 pelayaran aman tanpa insiden militer besar selama periode aktif perjanjian (Pedrozo, 2023).

Keterlibatan PBB memberikan legitimasi independensi yang lebih kuat dibandingkan aktor negara tunggal, sehingga mampu merancang struktur kesepakatan ganda yang saling menguntungkan atau win-win solution. Abbott dan Snidal menyatakan bahwa independensi organisasi internasional menurunkan biaya transaksi politik dan menyediakan titik temu yang mempermudah konvergensi kepentingan negara melalui pengelolaan operasi substantif yang

kompleks. PBB memfasilitasi dua perjanjian paralel yaitu satu inisiatif untuk ekspor gandum Ukraina dan satu untuk memfasilitasi ekspor pangan dan pupuk Rusia yang terkena dampak sanksi. Melalui skema ini, Ukraina mendapatkan kembali akses pasarnya yang menyumbang hampir 10% ekspor gandum global, sementara Rusia mendapatkan jaminan PBB untuk melobi pengecualian sanksi bagi sektor pertaniannya. Skema ini memastikan bahwa kepentingan ekonomi vital kedua negara terpenuhi secara bersamaan, sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh mediator yang dianggap bias.

Oleh karena itu, penulis memandang bahwa pada intinya, atribut independensi PBB yang membuat penawaran kesepakatan BSGI lebih dapat diterima dibandingkan tawaran secara unilateral dari Turki saja maupun negara-negara lain, adalah kemampuan PBB dalam mengubah fokus isu dari politik-militer yang sensitif menjadi isu kemanusiaan dan ketahanan pangan global yang mendesak. Transformasi isu ini memberikan landasan moral yang kuat, sehingga menolak kesepakatan akan memberikan beban reputasi yang berat bagi pihak yang bertikai di mata komunitas global. Netralitas PBB juga berfungsi krusial dalam merancang skema win-win solution, di mana kepentingan strategis Rusia terkait akses ekspor pupuk dan produk pertanian diakomodasi seimbang dengan kepentingan Ukraina untuk membuka blokade pelabuhannya. Hal ini berbeda dengan upaya mediasi dari aktor negara

lain sebelumnya yang sering kali terjebak dalam persepsi keberpihakan, sehingga cenderung hanya memenuhi kepentingan salah satu blok aliansi saja. Dengan demikian, kehadiran PBB sebagai honest broker mampu menjembatani defisit kepercayaan yang sangat lebar antara Rusia dan Ukraina melalui mekanisme pengawasan yang terlembaga dan tidak memihak.

Keterbatasan PBB dalam mempertahankan BSGI

1. Tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan negara

Meskipun pada tahap awal organisasi internasional formal memiliki kapasitas untuk memengaruhi keputusan dan perilaku negara anggota yang terbukti dari keberhasilan PBB membawa Rusia dan Ukraina ke dalam kesepakatan. Namun, kasus BSGI pada akhirnya menjadi ilustrasi nyata dari batasan fundamental independensi PBB tersebut. Dinamika ini menegaskan postulat Abbott dan Snidal bahwa otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional formal tetap terbatas karena adanya kepentingan dan kekuasaan negara kuat. Batasan ini terlihat jelas melalui keputusan sepihak Rusia untuk menarik diri dari kesepakatan pada Juli 2023, sebuah tindakan yang secara efektif meruntuhkan rezim BSGI (United Nations, 2023).

Kemampuan PBB untuk mempertahankan keberlangsungan kesepakatan tersebut terlihat rapuh karena sangat bergantung pada

kepuasan kepentingan negara anggota utamanya. Dalam perspektif Abbott dan Snidal, otonomi organisasi internasional bukanlah kekuasaan absolut, melainkan mandat yang rentan ditarik kembali jika negara anggota sebagai prinsipal merasa PBB sebagai agen gagal memenuhi keinginan mereka atau bertindak tidak sesuai dengan ekspektasi manfaat yang diharapkan. Hal ini terkonfirmasi ketika Rusia menanggukkan partisipasinya dengan argumen bahwa kesepakatan tersebut telah melenceng menjadi operasi komersial yang lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan Barat alih-alih negara berkembang yang membutuhkan (Sari & Ika, 2023).

Kegagalan ini menyoroti ketidakmampuan struktural PBB dalam menavigasi hambatan eksternal. Rusia secara spesifik menyoroti kegagalan implementasi kesepakatan terkait pencabutan hambatan ekspor produk pertanian dan pupuk Rusia, khususnya terkait koneksi kembali bank pertanian Rusia ke sistem SWIFT (Cree, 2023). Di sini, PBB terbukti tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengecualikan kepentingan Rusia dari rezim sanksi yang diterapkan oleh blok Barat. Ketika kalkulasi strategis Rusia menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan terhadap kerangka kerja PBB lebih besar daripada insentif ekonomi yang tidak didapatkan, insentif untuk patuh seketika menghilang. Runtuhnya BSGI dengan demikian memvalidasi bahwa

sekuat apa pun legitimasi institusional PBB, independensinya tetap tersandera oleh realitas politik kekuasaan negara-negara besar.

2. Ketidakmampuan dalam menegakkan aturan absolut

Kegagalan PBB dalam mempertahankan keberlanjutan BSGI pada tahun 2023 bersumber dari keterbatasan mendasar organisasi tersebut dalam memenuhi tuntutan ekonomi kompleks yang diajukan oleh Rusia khususnya terkait pencabutan hambatan sanksi Barat. Seperti teori Abbott dan Snidal, otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional tetap terbatas karena beberapa tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka bersifat sulit dan bahkan bisa tidak mungkin untuk dilakukan, mengingat desain sistem PBB yang tidak memiliki otoritas supra-nasional absolut dalam urusan domestik negara anggota. Hal ini terbukti dari ketidakmampuan PBB merealisasikan poin dalam kesepakatan Rusia-PBB yang menjanjikan fasilitasi ekspor pupuk dan pangan Rusia tanpa hambatan (United Nations, 2022b). Meskipun PBB berkomitmen untuk melibatkan otoritas terkait guna mengecualikan sektor ini dari sanksi, PBB tidak memiliki kuasa eksekutif untuk memaksa Uni Eropa atau Amerika Serikat menghubungkan kembali *Russian Agricultural Bank* ke sistem SWIFT atau menghapus hambatan asuransi dan logistik (Cree, 2023). Tugas untuk menembus rezim sanksi ekonomi negara-negara adidaya terbukti menjadi tugas

yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat PBB secara sepihak, sehingga janji tersebut gagal dieksekusi.

Ketidakmampuan PBB untuk menekan Barat agar melonggarkan sanksi perbankan membuat Rusia memandang PBB tidak cukup netral yang pada akhirnya menggerus kepercayaan Rusia terhadap peran PBB sebagai broker yang adil. Berdasarkan teori Abbott dan Snidal, jika organisasi internasional formal terlalu tunduk pada negara di mana dalam hal ini negara-negara Barat sebagai pemberi sanksi, maka organisasi tersebut akan kehilangan kredibilitas dalam atribut utamanya, yaitu independensi. Rusia secara terbuka menyatakan bahwa kesepakatan dengan PBB sama sekali tidak berkerja dan menuduh PBB tidak memiliki daya tawar untuk mengecualikan operasi ekspor Rusia dari sanksi Barat yang menyiratkan bahwa PBB terlalu lemah di hadapan kekuatan Barat (Sari & Ika, 2023). Persepsi bahwa PBB membiarkan kesepakatan tersebut berubah menjadi keuntungan sepihak bagi Ukraina dan korporasi Barat menyebabkan hilangnya kredibilitas PBB di mata Rusia. Akibatnya, Rusia merasa tidak ada lagi jaminan independensi yang bisa dipegang sehingga memilih untuk menghentikan kerja sama tersebut.

Namun, di sisi lain, keputusan Rusia untuk menarik diri dari kesepakatan dan menyebabkan runtuhnya BSGI sebenarnya juga didorong oleh pergeseran situasi domestik dan pasar global yang membuat kepatuhan pada perjanjian tidak lagi menguntungkan secara strategis baginya. Merujuk pada teori Abbott dan Snidal, salah satu alasan utama ketidakpatuhan negara pada aturan yang disepakati adalah dikarenakan adanya perubahan kondisi nasional atau internasional yang mengubah kalkulasi kepentingan negara tersebut. Pada awal kesepakatan, Rusia membutuhkan jalur aman, namun kondisi berubah pada tahun 2023 di mana Rusia mencatat rekor panen gandum hingga 130 juta ton yang memperkuat posisi tawarnya di pasar global tanpa memerlukan bantuan PBB sebesar sebelumnya (Pedrozo, 2023). Selain itu, Rusia menilai kondisi implementasi kesepakatan telah berubah arah menjadi operasi komersial yang menguntungkan perusahaan agribisnis Barat, bukan lagi misi kemanusiaan untuk negara berkembang seperti narasi awal (Sari & Ika, 2023). Perubahan kondisi lumbung pangan domestik dan persepsi penyimpangan tujuan kesepakatan inilah yang memicu ketidakpatuhan Rusia dan penghentian partisipasinya.

PBB terjebak dalam posisi dilematis di mana upaya agresif untuk memaksa pemenuhan tuntutan Rusia justru akan mengancam eksistensi peran diplomatiknya karena berpotensi memicu penarikan

dukungan dari kekuatan Barat. Posisi independensi organisasi internasional formal pada dasarnya berada pada ekuilibrium yang rapuh. Jika organisasi bertindak terlalu membangkang atau terlalu jauh melangkahi keinginan prinsipal utamanya, maka organisasi internasional formal akan kehilangan relevansi atau dukungan politik yang krusial bagi operasinya. PBB harus berhati-hati untuk tidak menuntut pencabutan sanksi secara konfrontatif kepada negara-negara lain, karena hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan negara-negara tersebut dalam merespons agresi. Jika PBB memaksakan kehendak Rusia, PBB berisiko kehilangan dukungan negara-negara lain, khususnya Barat yang menjadi penyokong utama sistem internasional, seperti yang disebut oleh Satoh (Satoh, 2022). Pilihan untuk tidak membangkang terhadap rezim sanksi Barat ini, meskipun menjaga relevansi PBB di mata Barat, pada akhirnya membuat PBB gagal mempertahankan dukungan Rusia, yang berujung pada penghentian inisiatif tersebut.

Dengan demikian, penulis memandang bahwa ketidakmampuan otoritas PBB dalam penegakan aturan pada kasus BSGI berakar pada ketiadaan mandat supra-nasional absolut untuk mengintervensi kebijakan domestik negara-negara adidaya, khususnya dalam menembus rezim sanksi Barat yang menghambat ekspor Rusia.

Keterbatasan struktural ini menjadikan janji fasilitasi akses pasar bagi

Rusia sebagai tugas mustahil yang gagal dieksekusi sehingga pada akhirnya menggerus persepsi netralitas PBB dan memicu krisis kepercayaan dari Rusia. Tidak berdayanya PBB untuk menekan Barat demi memenuhi tuntutan Rusia pada akhirnya memberikan justifikasi strategis bagi Rusia yang juga dipengaruhi oleh penguatan posisi tawar ekonomi domestiknya untuk membatalkan kepatuhan dan meruntuhkan kesepakatan tersebut secara sepihak.

Kesimpulan

PBB berhasil menjadi inisiator kesepakatan karena mampu memanfaatkan atribut independensinya untuk melakukan pencucian isu dan netralitas operasional. PBB sukses mengubah bingkai konflik dari isu politik-militer yang sensitif di mana konsesi dianggap sebagai kelemahan menjadi isu kemanusiaan dan ketahanan pangan yang memiliki legitimasi moral universal. Melalui pembentukan JCC, PBB menyediakan mekanisme verifikasi pihak ketiga yang objektif yang berhasil menjembatani defisit kepercayaan antara Rusia dan Ukraina yang tidak dapat dilakukan oleh mediator negara tunggal.

Namun, PBB gagal mempertahankan kesepakatan karena atribut independensinya terbentur oleh batasan kedaulatan negara dan struktur kekuasaan global. Sebagai agen, otonomi PBB terbatas dan tidak memiliki otoritas supra-nasional untuk memaksakan kehendak

pada negara-negara Barat sebagai prinsipal agar mencabut sanksi ekonomi terhadap Rusia. Ketidakmampuan PBB memenuhi janji memfasilitasi ekspor Rusia dikarenakan hal tersebut bergantung pada kebijakan domestik negara adidaya pada akhirnya menggerus kredibilitas netralitasnya di mata Rusia. Ketika kalkulasi kepentingan nasional Rusia berubah dan insentif ekonomi dari PBB tidak terealisasi, Rusia menarik diri. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas PBB sangat bergantung pada konvergensi kepentingan negara-negara kuat.

Mengingat PBB tidak dapat mengubah struktur anarki internasional ataupun melanggar kedaulatan negara anggota secara paksa, diperlukan strategi untuk memaksimalkan independensi PBB dalam menangani kasus serupa di masa depan. Pertama, PBB harus menghindari pembuatan klausul perjanjian yang bergantung sepenuhnya pada diskresi kebijakan domestik negara pihak ketiga di mana dalam hal ini adalah seperti Amerika Serikat tanpa adanya kepastian yang jelas. Sebelum menawarkan kesepakatan kepada pihak yang berkonflik, PBB harus terlebih dahulu mengamankan dokumen ‘jaminan’ spesifik dari negara pemberi sanksi untuk mencegah PBB terjebak dalam posisi ‘pemberi janji palsu’ yang merusak kredibilitas independensinya. Kedua, PBB perlu mendorong pembentukan mekanisme pembayaran khusus yang secara permanen dikecualikan dari rezim sanksi global untuk transaksi pangan dan pupuk. Dengan

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

melembagakan jalur ini di bawah pengawasan ketat PBB dan bukan perbankan negara Barat, PBB dapat menjamin akses pasar bagi negara yang terkena sanksi tanpa harus memohon pencabutan sanksi politik secara keseluruhan, sehingga menjaga netralitasnya tetap terjaga di mata kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abbott, Kenneth W., dan Duncan Snidal. 1998. "Why states act through formal international organizations." *Journal of Conflict Resolution* 42 (1). <https://doi.org/10.1177/0022002798042001001>.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. CV. Syakir Media Press. https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id&source=gbs_pub_info_r#v=onepage&q&f=false.
- Ay, Hakkı M., dan Adnan Söylemez. 2023. "Grain Corridor Agreement and Turkey's Role in the Russia-Ukraine War." *Journal of Islamic World and Politics* 7 (1). <https://doi.org/10.18196/jiwp.v7i1.27>.
- Bondarenko, Olga. 2025. *Shockwaves from Ukraine: Trends and Gaps in Agricultural Commodity Prices*. JEL Codes: C32, C63, Q11. Kyiv. www.bank.gov.ua.
- Devadoss, Stephen, dan William Ridley. 2024. "Impacts of the Russian invasion of Ukraine on the global wheat market." *World Development* 173 (Januari): 106396. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2023.106396>.
- George, Tegan, dan Julia Merkus. 2025. "Explanatory Research | Definition, Guide, & Examples." Scribbr, Januari 14. <https://www.scribbr.com/methodology/explanatory-research/>.
- McGuirk, Eoin, dan Marshall Burke. 2022. "War in Ukraine, world food prices, and conflict in Africa | CEPR." Centre for Economic Policy

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

Research, Mei 26. <https://cepr.org/voxeu/columns/war-ukraine-world-food-prices-and-conflict-africa>.

Pedrozo, Raul. 2023. *The Black Sea Grain Initiative: Russia's Strategic Blunder or Diplomatic Coup?* Vol. 100. no. 421. Stockton Center for International Law. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-07-22/note-corre->.

Rankin, Jennifer, Julian Borger, Dan Sabbagh, dan Luke Harding. 2022. "Ukraine says talks in Turkey with Russia fail to make progress towards ceasefire | Ukraine | The Guardian." The Guardian, Maret 10. <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/ukraine-talks-turkey-russia-fail-progress-ceasefire>.

Roth, Andrew, dan Julian Borger. 2022. "Talks between Macron and Putin fail to produce Ukraine breakthrough | Ukraine | The Guardian." The Guardian, Februari 7. <https://www.theguardian.com/world/2022/feb/07/macron-warns-dont-expect-miracles-in-talks-with-putin-over-ukraine>.

Sudirman, Raihana Dzakira. 2025. "BLACK SEA GRAIN INITIATIVE SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS GLOBAL: KETAHANAN PANGAN DAN GEOPOLITIK PASCA INVASI RUSIA." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9 (4): 2025.

Trading Economics. 2025. "Wheat - Price - Chart - Historical Data - News." Trading Economics. <https://tradingeconomics.com/commodity/wheat>.

Tyshchenko, Kateryna, dan Iryna Kutielieva. 2025. "Germany's Merz unwilling to speak with Putin as he only escalates attacks post-talks | Ukrainska Pravda." Ukrainska Pravda, Juni 28. <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/06/28/7519200/>.

United Nations. 2022. "Black Sea Grain Initiative." Joint Coordination Centre. <https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative>.

United Nations. 2023. "UN chief regrets Russia's decision to withdraw from grain deal | UN News." UN News Global perspective Human stories, Juli 17. <https://news.un.org/en/story/2023/07/1138752>.

Muhammad Iqbal Devanto, Amelia Fatimatuzzahra, Zamharirah Sang Putri	Kekuatan dan Keterbatasan Atribut Independensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam <i>Black Sea Grain Initiative</i> (BSGI) antara Rusia-Ukraina pada Tahun 2022-2023
---	--

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Muhammad Iqbal Devanto, S. S., mahasiswa yang sedang menempuh jenjang magister departemen Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Alumni sarjana Sastra Inggris dari Universitas Negeri Malang.

Amelia Fatimatuzzahra, S. Sos., mahasiswa yang sedang menempuh jenjang magister departemen Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Alumni sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Zamharirah Sang Putri, S. Sos., mahasiswa yang sedang menempuh jenjang magister departemen Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Alumni sarjana Hubungan Internasional dari Universitas President.